

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI DESA KALIWINING KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

Sutomo¹, Muhammad Abdurrochim²

^{1,2}Universitas Jember, Jember, Indonesia

Email: sutomofisip5@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi di kalangan perempuan perdesaan masih menjadi tantangan utama pemberdayaan masyarakat. Program Jatim Puspa hadir untuk memperkuat kapasitas usaha produktif perempuan graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jatim Puspa di Desa Kaliwining, Jember, menggunakan model implementasi kebijakan David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan informan *purposif* meliputi penerima manfaat, pendamping, aparatur desa, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pendapatan, meringankan beban modal usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat ketidaksesuaian bentuk bantuan dengan kebutuhan spesifik penerima, minimnya keterampilan manajemen usaha, disparitas pemahaman mekanisme program, serta lemahnya koordinasi dan transparansi. Oleh karena itu, program ini memerlukan optimalisasi menyeluruh pada aspek analisis kebutuhan, pendampingan, pelatihan, sosialisasi, serta koordinasi lintas instansi.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Jatim Puspa, Implementasi Kebijakan.*

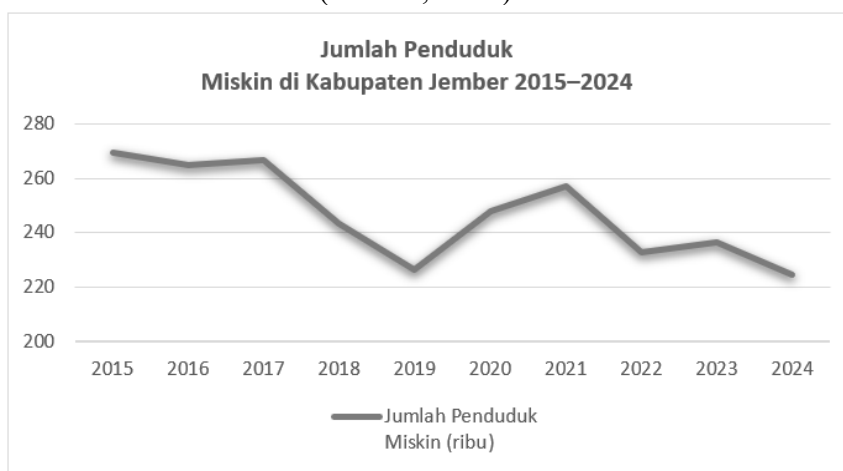
Abstract

Poverty and limited economic access among rural women remain major challenges to community empowerment. The Jatim Puspa Program aims to strengthen the productive business capacity of women graduating from the Family Hope Program (PKH). This descriptive qualitative research aims to analyze the implementation of the Jatim Puspa Program in Kaliwining Village, Jember, using David C. Korten's policy implementation model, which emphasizes the alignment between the program, implementing organization, and beneficiaries. Data collection was conducted through semi-structured interviews, observation, and documentation with purposive informants including beneficiaries, facilitators, village officials, and relevant agencies. The results indicate that the program has successfully increased income, reduced the burden of business capital, and strengthened economic independence. However, its implementation has not been fully optimized due to the inconsistency of the form of assistance with the specific needs of recipients, minimal business management skills, disparities in understanding the program's mechanisms, and weak coordination and transparency. Therefore, this program requires comprehensive optimization in the aspects of needs analysis, mentoring, training, socialization, and cross-agency coordination.

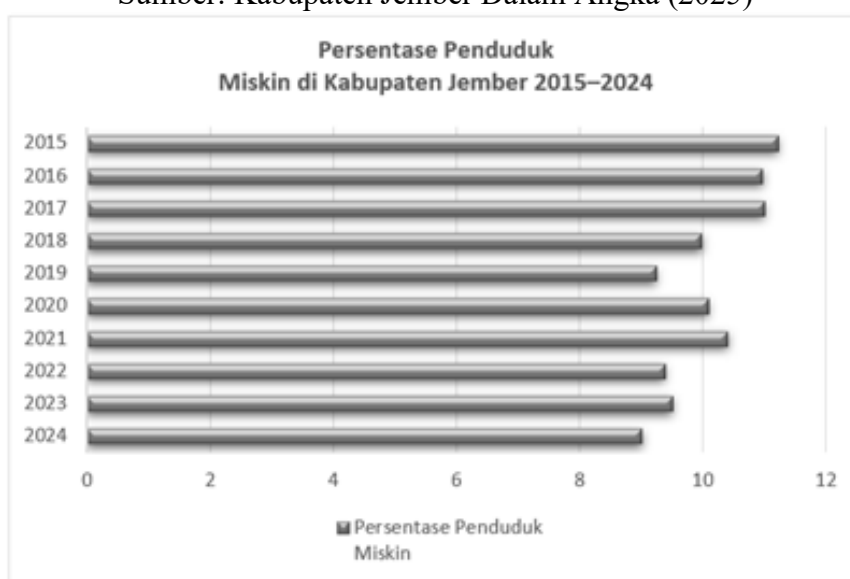
Keywords: *Community Empowerment, Jatim Puspa, Policy Implementation.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial multidimensi yang kompleks karena tidak hanya menyangkut defisit pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi yang setara (Arafat, 2023; Balasubramanian, Burchi, & Malerba, 2023). Kelompok yang paling rentan terhadap situasi ini adalah perempuan pedesaan yang kerap menjalankan peran krusial dalam rumah tangga namun termarginalisasi dari akses permodalan dan penguasaan aset (Utomo & Arianto, 2025; Kasim, Rahman, & Yusuf, 2024). Di Kabupaten Jember, angka kemiskinan menunjukkan tren fluktuatif di mana persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 8,67 persen atau setara dengan 216.076 jiwa. Meskipun tren ini menunjukkan adanya penurunan perlahan, intervensi jaring pengaman sosial yang berkesinambungan tetap krusial agar kelompok rentan ini tidak terperosok kembali ke dalam siklus kemiskinan antargenerasi (Anggrasari & Hanri, 2025; Alkire, Kanagaratnam, & Suppa, 2023). Oleh karena itu, tantangan tersebut membutuhkan penanganan komprehensif yang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan memberdayakan kapasitas ekonomi sasaran agar mampu mandiri. Intervensi kebijakan yang terfokus pada inklusi finansial menjadi elemen penting untuk meningkatkan daya tawar perempuan dalam perekonomian lokal secara struktural (Arshad, 2023).



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jember 2015-2024
Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka (2025)



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember 2015–2024
Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka (2025)

Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) yang dilegitimasi secara formal melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023. Kebijakan publik ini secara spesifik menargetkan perempuan graduasi Program Keluarga Harapan (PKH) agar memiliki kesinambungan mata pencaharian pasca-bantuan sosial (Muqit & Hikmah, 2025; Khaerul, 2024). Intervensi program diwujudkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp2.500.000,00 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam wujud barang modal usaha, di mana dua puluh persen darinya wajib dialokasikan untuk sektor ketahanan pangan lokal. Pendekatan intervensi berupa penyediaan akses modal dan pelatihan berbasis komunitas telah terbukti di berbagai negara berkembang memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kemandirian ekonomi perempuan secara luas (Mengstie, 2022; Sharma & Das, 2021).

Desa Kaliwining, yang secara demografis memiliki jumlah individu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tertinggi di Kecamatan Rambipuji, dipilih sebagai lokus pelaksanaan program karena tingginya heterogenitas usaha mikro yang digerakkan oleh perempuan. Meskipun Desa Kaliwining menerima alokasi kuota program sebanyak 60 KPM, observasi empiris mengindikasikan adanya kendala implementatif yang cukup serius dalam proses translasinya di lapangan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Permasalahan menonjol yang ditemukan antara lain adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang diusulkan dengan yang direalisasikan, seperti larangan pengajuan ternak berkaki empat yang memaksa KPM beralih ke ternak tanpa dibekali pelatihan teknis budidaya. Selain itu, lambatnya koordinasi antaraktor di jajaran pemerintah desa dan terbatasnya literasi manajemen usaha di kalangan KPM menyebabkan mundurnya proses penyaluran bantuan hingga beberapa bulan. Kendala akurasi pendataan serta intervensi dari oknum lokal juga berpotensi mendistorsi ketepatan sasaran kebijakan pemberdayaan di tingkat akar rumput (Prasetijo et al., 2025; Dwiyanto, 2021).

Tabel 1. Jumlah Individu dan Keluarga Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Kemiskinan (Orang)	Ketelantaran (Orang)	Kecacatan (orang)	Korban Bencana (Orang)
Curah Malang	1.629	-	15	1
Nogosari	4.534	-	176	2
Rowotamtu	2.686	-	25	1
Pecoro	2.083	-	2	1
Rambipuji	2.535	-	27	7
Kaliwining	5.090	-	47	1
Rambigundam	2.483	-	28	1
gugut	2.524	-	61	2
Kecamatan Rambipuji	23.564	-	381	16

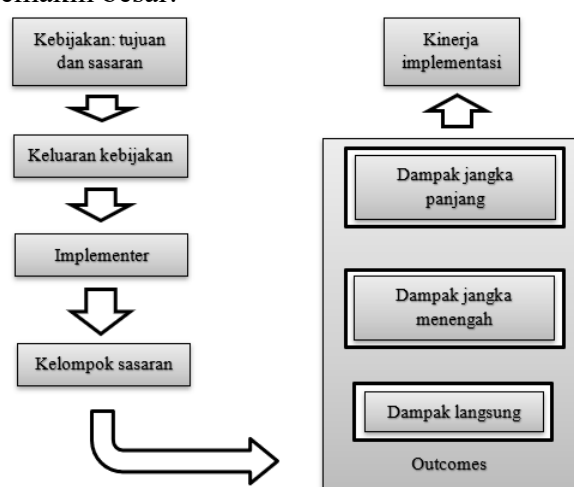
Sumber: Kecamatan Rambipuji dalam Angka (2025)

Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang mayoritas berfokus secara linier pada evaluasi hasil akhir atau profitabilitas usaha semata, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara utuh tahapan proses implementasi menggunakan kerangka Model Kesesuaian (*Fit Model*) dari David C. Korten. Teori ini menuntut adanya interaksi yang harmonis antara program yang dirancang, organisasi pelaksana di lapangan, dan pemanfaat kebijakan untuk mencegah terjadinya resistensi sosial (Korten, 1984; Coy et al., 2021). Dalam kerangka kerja ini, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada dukungan relasional dan ketersediaan ruang aspirasi, bukan hanya sekadar pada aspek distribusi modal fisik (Coley et al., 2021; Korten & Sjahrir, 1988). Melalui paradigma tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana

implementasi Program Jatim Puspa di Desa Kaliwining berjalan, serta mengurai berbagai disfungsi operasional yang terjadi pada level implementasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

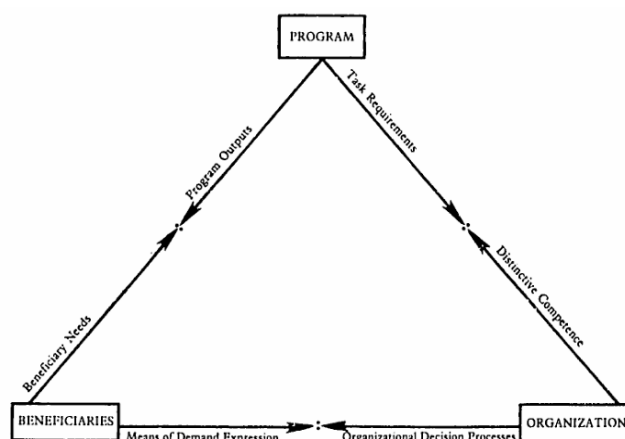
Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan kritis dalam siklus administrasi negara yang menentukan apakah sebuah rancangan kebijakan formal dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak di masyarakat. Implementasi bukan sekadar kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*policy output*) kepada kelompok sasaran, melainkan sebuah mekanisme penyampaian (*delivery mechanism*) yang menjembatani rasionalitas pembuat kebijakan dengan realitas sosial yang kompleks (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Keberhasilan implementasi program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptasi aktor di lapangan dan keluwesan birokrasi dalam merespons kebutuhan spesifik di tingkat desa. Ketika program dipaksakan secara top-down tanpa negosiasi kontekstual, maka risiko terjadinya deviasi antara tujuan program dan capaian hasil di lapangan akan semakin besar.



Gambar 3. Proses Implementasi

Sumber: Purwanto & Sulistyastuti (2015)

Untuk membedah kompleksitas implementasi tersebut, Model Kesesuaian (Fit Model) yang dikembangkan oleh Korten (1984) memberikan kerangka analitis yang relevan dan holistik bagi program pemberdayaan. Korten mensyaratkan tiga dimensi kesesuaian utama, yakni kesesuaian antara program dengan penerima manfaat yang menilai apakah output program relevan dengan masalah ekonomi riil masyarakat sasaran. Kesesuaian kedua adalah antara program dengan organisasi pelaksana yang menyoroiti apakah tuntutan tugas kebijakan selaras dengan kompetensi dan fleksibilitas institusi pendamping di lapangan. Sementara kesesuaian ketiga adalah antara penerima manfaat dengan organisasi pelaksana yang menuntut tersedianya ruang demokratis bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan serta keluhannya. Ketiga pilar ini menegaskan bahwa kelompok miskin tidak boleh direduksi menjadi objek pasif, melainkan harus dilibatkan secara aktif sebagai subjek dalam keseluruhan proses pembelajaran pembangunan.



Gambar 4. Model Implementasi Kesesuaian

Sumber: David C. Korten (1984)

Sejumlah studi terdahulu memberikan fondasi empiris mengenai isu ini. Evaluasi yang dilakukan oleh Sa'bana (2023) serta Muqit dan Hikmah (2025) pada program Jatim Puspa di wilayah lain menunjukkan bahwa intervensi ini cukup efektif menstimulasi mata pencaharian, namun pelaksanaannya masih rapuh dalam aspek pendampingan pasca-penyaluran barang dan transparansi penargetan administratif. Di tataran global, riset oleh Gu dan Nie (2021) di Tiongkok juga mengonfirmasi bahwa intervensi portofolio yang menggabungkan modal, koperasi, dan literasi bagi perempuan miskin dapat memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan secara multidimensi. Namun, efektivitas dan keberlanjutan tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila evaluasi program tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi kuantitatif makro, melainkan harus melibatkan ruang aspirasi yang menangkap narasi pengalaman serta perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh perempuan di tingkat akar rumput.

C. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena implementasi kebijakan secara naturalistik dan mendalam. Desain kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk membedah interaksi sosial, proses manajerial, serta persepsi aktor-aktor yang terlibat langsung dalam siklus kebijakan, alih-alih sekadar mengukur output dengan statistik (Sugiyono, 2023). Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan periode pengamatan difokuskan pada dinamika pelaksanaan program sejak persiapan hingga evaluasi awal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keragaman unit usaha mikro yang digeluti oleh perempuan graduasi PKH serta status Desa Kaliwining sebagai salah satu kantong kemiskinan tertinggi di wilayah kecamatan tersebut yang membutuhkan intervensi pemberdayaan (Tresiana & Duadji, 2020). Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk merekam secara holistik jalannya tahapan program dari awal pendataan hingga pasca-penyserahan aset guna melihat seberapa jauh wujud konversinya menjadi kemandirian ekonomi.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive* yang didasarkan pada penguasaan informasi narasumber, yang kemudian dikombinasikan dengan *snowball* untuk memperkaya dan menyaturasi kedalaman data di lapangan (Sugiyono, 2023). Informan kunci terdiri dari dua puluh enam KPM yang merepresentasikan berbagai jenis usaha, empat orang Pendamping Desa, satu orang Pendamping Kabupaten, perangkat Desa Kaliwining, serta aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember. Keterlibatan spektrum informan yang luas ini diperlukan guna menangkap perspektif multiaktor (*bottom-up dan top-down*) dalam eksekusi kebijakan. Metode pengumpulan data

primer bersumber dari wawancara semi-terstruktur yang memberikan ruang fleksibilitas bagi narasumber untuk bercerita, yang dikombinasikan dengan observasi partisipatif pada kegiatan usaha pemanfaat, serta penelusuran dokumentasi administratif terkait program Jatim Puspa.

Untuk menjamin tingkat kepercayaan dan keabsahan data kualitatif yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data kesaksian dari para KPM disilang-cek secara ketat dengan keterangan pendamping lapangan maupun dokumen resmi penyerahan bantuan (Sugiyono, 2023). Selanjutnya, proses analisis data berpedoman pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Proses ini secara berurutan meliputi tahapan kondensasi data (*data condensation*) untuk menyeleksi informasi krusial, penyajian data (*data display*) secara naratif dan visual, hingga bermuara pada penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Rangkaian metodologis yang sistematis ini memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan dinamika empiris implementasi program sesuai kerangka kerja kesesuaian dari David C. Korten.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Program Jatim Puspa di Desa Kaliwining secara umum telah mengikuti prosedur operasional standar (SOP) melalui mekanisme yang berjenjang dari tingkat provinsi hingga desa. Tahapan dimulai dari musyawarah sosialisasi yang melibatkan perangkat daerah, lalu dilanjutkan dengan verifikasi data usulan yang mereduksi lebih dari 200 data graduasi PKH menjadi 60 KPM terpilih. Setelah itu, dilakukan proses identifikasi partisipatif terhadap kebutuhan usaha, yang bermuara pada pengadaan dan pendistribusian barang modal usaha senilai total Rp2.500.000,00 per penerima. Fase berikutnya mencakup kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta pelaporan pertanggungjawaban melalui sistem elektronik EMKP. Untuk mengkaji kualitas pelaksanaan secara lebih utuh dan akademis, hasil lapangan ini dianalisis menggunakan tiga dimensi kesesuaian dari David C. Korten. Secara skematis, konfigurasi interaksi tersebut tergambar pada pola adaptasi KPM dan respons birokrasi pelaksana.



Gambar 5. Skema pelaksanaan Program Jatim Puspa

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Dimensi pertama adalah kesesuaian antara program dengan penerima bantuan (*Fit between program output and beneficiary needs*). Kebijakan untuk tidak memberikan uang tunai melainkan mendistribusikan aset produktif fisik dinilai tepat sasaran karena berhasil menekan kecenderungan perilaku konsumtif harian para KPM. Namun demikian, tingkat kesesuaian program ini terkoreksi secara tajam saat aturan baku dari pemerintah justru membatasi fleksibilitas kebutuhan teknis KPM di lapangan. Sebagai contoh empiris, beberapa KPM yang sesungguhnya memiliki keahlian beternak kambing terpaksa harus menerima bantuan bibit ayam atau lele demi memenuhi porsi wajib alokasi 20 persen ketahanan pangan dari petunjuk teknis. Akibat nihilnya edukasi tambahan atau pelatihan teknis pembesaran bagi hewan substitusi tersebut, banyak bibit lele dan ayam yang berujung mati sehingga justru menimbulkan kerugian material. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi aset ekonomi yang kaku tanpa disertai pelatihan teknis terintegrasi akan sangat melemahkan daya guna dan keberlanjutan bantuan.

manusia, injeksi modal semata belum cukup untuk menuntaskan problem kemiskinan struktural.

Tabel 2. Tabel Kinerja Program

Jenis Usaha/Bantuan	KPM	Indikasi Kinerja	Keterangan
Bahan produksi	Holifah (tahu), Susanti (kue), Yuyun (Kue), Siti Maisaroh (kue), Ifitah (bakso)	Berhasil	Bantuan mengurangi utang bahan baku dan mendukung produksi
Usaha jajanan/sosis	Luthfia, Nasiha, Ririn, Dahlia, Sundari, Poni, Yayuk, Heliyah, Siti Khotijah	Berhasil	Bantuan kompor dan bahan jualan langsung digunakan untuk usaha
Usaha menjahit	Titin Endang Ratnawati, Supiyati	Berhasil	Bantuan alat mempercepat pekerjaan dan mendukung usaha yang sudah berjalan
Jasa	Warti (pijat)	Berhasil	Bantuan masih digunakan secara berkelanjutan dan dapat mengurangi modal
Usaha dagang/kelontong	Mauluda, Sofuro, Jumati, Alfiyah	Cukup berhasil	Bantuan digunakan sebagai tambahan modal dan barang jualan
Ternak/budidaya	Siti Musyarafah	Cukup berhasil	Bantuan bebek masih dapat dimanfaatkan, terus bertambah, dan menghasilkan telur
Budidaya lele	Fitri Rahmawati, Luluk Musta'adah,	Kurang optimal	KPM belum memiliki pengalaman teknis sehingga banyak lele tidak berkembang
Ternak ayam	Murni Sanjaya, Sutik	Kurang optimal	Banyak ayam mati, tidak sesuai ukuran, dan bantuan belum menghasilkan manfaat ekonomi

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

E. KESIMPULAN

Implementasi Program Jatim Puspa di Desa Kaliwining telah berjalan cukup tertib dari sisi pelaporan administratif dan terbukti sukses memberikan daya dukung stimulus bagi awal kemandirian ekonomi perempuan graduasi PKH. Bantuan aset modal tersebut mampu menurunkan beban biaya operasional harian rumah tangga secara langsung serta memantik need for achievement perempuan dalam menjalankan usaha mikro riil. Namun demikian, analisis yang berlandaskan model kesesuaian Korten mengungkap bahwa efektivitas program ini belum menyentuh titik keberhasilan yang optimal akibat adanya diskrepansi pada level teknis operasional. Ketidaksihesuaian wujud bantuan dengan kapasitas teknis bawaan KPM, lambatnya laju birokrasi imbas campur tangan faksi lokal, serta absennya agenda pembinaan dan literasi manajemen usaha jangka panjang menjadi faktor penghambat fundamental yang mengurangi nilai keberlanjutan intervensi ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, implikasi strategis bagi penyelenggara negara dan pengambil kebijakan adalah urgensi untuk merekonstruksi kembali fase asesmen kebutuhan

agar pendistribusian modal lebih presisi, transparan, dan fleksibel menyesuaikan kapabilitas soft-skill pemanfaat di tingkat lokal. Oleh karena itu, disarankan kepada Dinas PMD dan aparatur desa untuk tidak mereduksi perannya sebatas sebagai agen penyalur barang, melainkan harus bertransformasi menjadi penyedia ekosistem pelatihan teknis berkelanjutan. Pendampingan ekstra khususnya wajib diberikan untuk bantuan sektor budidaya pangan agar aset hidup tersebut tidak berujung mati dan merugikan KPM. Pemerintah desa juga dituntut untuk melembagakan sistem transparansi data yang lebih ketat, guna menangkal risiko intervensi politik lokal yang menyebabkan bias seleksi penerima manfaat.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan ruang lingkup karena hanya memusatkan fokus pengamatan pada satu titik lokasi, yakni Desa Kaliwining, dengan durasi waktu evaluasi yang terbatas pada fase awal pasca-penyaluran program. Dinamika sosial dan birokratis yang terekam dalam riset ini sangat terikat pada konfigurasi sosial-budaya setempat yang mungkin berbeda karakteristiknya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif berskala multidaerah guna menangkap pola variasi spasial. Selain itu, diperlukan riset longitudinal jangka panjang guna mengukur indeks transformasi keberlanjutan usaha mikro perempuan secara utuh dan lebih presisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2023). A decade of multidimensional poverty reduction: Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, *161*, 106119.
- Anggrasari, F. P., & Hanri, M. (2025). Breaking the Poverty Cycle: Impact of Social Assistance on Intergenerational Poverty. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *6*(2), 225-238.
- Arafat, S. P. I. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arianto, N. U. N. (2025). Implementation of the Distribution of the Jatim Puspa Program Through Special Financial Assistance for Community Empowerment in Kediri District. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *23*(1), 480-488.
- Arshad, A. (2023). Nexus between financial inclusion and women empowerment: Evidence from developing countries. *Gender in Management: An International Journal*, *38*(4), 561–580.
- Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, *161*, 106119.
- Coley, C., Sheshadri, S., Devanathan, S., & Bhavani, R. R. (2021). Contextualizing women's empowerment frameworks with an emphasis on social support: A study in rural, South India. *Community, Work & Family*, *24*(1), 1–21.
- Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: A critical review of the definitions, drivers and outcomes. *Energy Research & Social Science*, *72*, 101871.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gu, R., & Nie, F. (2021). Does empowering women benefit poverty reduction? Evidence from a multi-component program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China. *Journal of Integrative Agriculture*, *20*(4), 1092–1106.
- Hasanah, U., & Alfiana, S. D. (2022). Implementasi Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, *22*(1), 97-114.

- Kasim, N., Rahman, S., & Yusuf, M. (2024). Gender-responsive agricultural education and women farmers' empowerment in rural Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 102, 103145.
- Khaerul, S. (2024). Women empowerment through the home palm sugar industry in Hariang village, Sobang district, Lebak regency in banten Indonesia. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 24(6), 26564-26779.
- Korten, D. C. (1984). *People-Centered Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Korten, D. C., & Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mengstie, B. (2022). Impact of microfinance on women's economic empowerment. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 55.
- Muqit, M., & Hikmah, F. N. Evaluasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Dalam Menciptakan Mata Pencaharian Berkelanjutan Bagi Keluarga Miskin di Desa Karangharjo Kabupaten Jember. *Jurnal Kebijakan Publik*, II(1), 117-131.
- Prajuliyanto, A. (2025). Women's empowerment through farmers' women's groups (KWT): Enhancing female productivity in rural Indonesia. *JOSAR: Journal of Students Academic Research*, 10(2), 1–7.
- Prasetijo, K. T., Handoko, V. R., Rupiarsieh, R., & Wulandari, S. (2025). Implementation of extreme poverty alleviation policies based on data credibility in Bojonegoro Regency. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 12(4).
- Sharma, E., & Das, S. (2021). Integrated model for women empowerment in rural India. *Journal of International Development*, 33(4), 594–611. DOI: 10.1002/jid.3539
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, A., & Thoha, M. (2000). *Implementasi kebijakan jaring pengaman sosial: Studi kasus program pengembangan kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan* (Tesis Universitas Gadjah Mada).
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Pentingnya kapital sosial dan koproduksi*. Suluh Media.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Policy cluster affirmative empowerment and strengthening of coastal community women home industries. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Biomass 2019* (Vol. 202, pp. 11–20). Atlantis Press.